

KARAKTERISTIK RUMAHTANGGA PETANI USAHA PADI PENERIMA PKH DI KABUPATEN KARAWANG, JAWA BARAT

RICE SMALLHOLDER CHARACTERISTICS OF PKH RECIPIENT IN KABUPATEN KARAWANG, WEST JAVA

Arham Rivai^{1*}, Bonar M. Sinaga², Hermanto Siregar², Harianto²

¹Badan Pusat Statistik

²Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

*Penulis korespondensi: arham@bps.go.id

ABSTRACT

Information about the characteristics of rice smallholder who are recipients of the conditional cash transfer programme (PKH) is very necessary, especially for policy makers to get a preliminary picture as a step to further analyze the rural poverty alleviation policy that is currently a central issue. This paper aims to describe the characteristics of farmers in PKH recipients in Karawang Regency. The results of the description analysis are land tenure, household characteristics, income structure, farm input structure, and household consumption patterns of rice smallholder in Karawang Regency, West Java.

Keywords: *rice smallholder, conditional cash transfer, social protection programme*

ABSTRAK

Informasi mengenai karakteristik petani usaha padi yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diperlukan terutama bagi pengambil kebijakan agar mendapat gambaran awal sebagai langkah untuk menganalisis lebih lanjut perihal kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan yang menjadi isu sentral saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik petani usaha padi penerima PKH di Kabupaten Karawang. Hasil analisis deskripsi menghasilkan gambaran spesifik tentang penguasaan lahan petani penggarap, karakteristik rumahtangga, struktur pendapatan, struktur input usahatani, dan pola konsumsi rumahtangga dari rumahtangga usaha padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kata kunci: program keluarga harapan, program perlindungan sosial, petani penggarap

PENDAHULUAN

Salah satu dari 7 target yang ingin dicapai SDGs mengenai kemiskinan pada tahun 2030, adalah penerapan sistem perlindungan sosial dengan cakupan yang substansial bagi kaum miskin dan rentan miskin (UNDP 2015). Lebih lanjut, perlindungan sosial untuk pertanian dalam rangka memutus siklus kemiskinan di pedesaan menjadi tema yang dibangun pada hari pangan sedunia tahun 2015. Tema ini diangkat mengingat lebih dari 75 persen masyarakat miskin dan penderita gizi buruk kronis di negara-negara berkembang tinggal di pedesaan (FAO 2015).

Sementara itu, peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi telah menjadi topik utama sejak tahap awal pemikiran pembangunan bahkan hingga saat ini. Secara luas diakui bahwa pertanian berubah perannya sesuai dengan tahap perkembangan pembangunan, termasuk perannya dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Tiberti dan Tiberti (2015), mengabaikan pertumbuhan pertanian di tahap awal pembangunan pada umumnya akan menghasilkan kegagalan. Pembangunan pertanian tidak dapat diabaikan begitu saja dalam strategi pengentasan kemiskinan, lebih-lebih di negara-negara yang masih didominasi oleh ekonomi pedesaan. Menurut Ravallion dan Datt (1996), pengurangan kemiskinan yang berbasis pertanian umumnya lebih efektif daripada pertumbuhan berbasis non pertanian. Dari uraian ini tersirat bahwa perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dapat diarahkan kepada kebijakan pembangunan pertanian.

Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan (*rural poverty alleviation*), Pemerintah melaksanakan kebijakan program perlindungan sosial (PPS). Instrumen-instrumen kebijakan PPS berupa program-program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran tertentu (*targeted programme*) yang dibagi ke dalam klaster-klaster. Klaster I adalah program bantuan langsung kepada mereka yang tergolong sangat miskin, miskin, dan hampir miskin mencakup pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga yang meliputi: pangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan (TNP2K 2017). Program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu program yang memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfer*). Program lainnya yaitu bantuan beras bagi masyarakat miskin (Raskin, sekarang Ranstra), yang merupakan kategori bantuan langsung dalam bentuk barang (*in-kind transfer*).

Kabupaten Karawang merupakan kabupaten penghasil padi terbesar kedua di Jawa Barat setelah Indramayu (BPS 2017). Sampai saat ini Kabupaten Karawang masih termasuk dalam daerah lumbung padi nasional (Chofyan *et al.* 2015). Terdapat 122 ribu rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan dan lebih dari separuhnya (64 ribu) merupakan rumah tangga petani gurem (BPS 2017b). Selain itu, persentase jumlah penduduk miskin di tahun 2017 sebesar 10,25 persen dari sekitar 2,3 juta jiwa atau sekitar 457 rumah tangga (BPS 2017a). Dari keseluruhan jumlah penduduk miskin tersebut, sekitar 61 persen diantaranya (16,5 juta jiwa) berada di daerah pedesaan. Proporsi jumlah penduduk miskin di pedesaan secara nasional tidak bergeser selama 20 tahun, yakni masih berada di atas angka 62 persen (BPS 2017a). Pada umumnya, penduduk miskin bertempat tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di sektor pertanian (Ravallion *et al.* 2007; Todaro dan Smith 2006). Pada tahun 2017 Kementerian Sosial telah menyalurkan PKH kepada sekitar 60 ribu rumah tangga yang didalamnya termasuk rumah tangga usaha padi (Pemkab 2017). Petani peserta PKH merupakan cerminan petani miskin, karena sasaran PKH merupakan rumah tangga dengan pendapatan yang rendah dan termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin atau hampir miskin (TNP2K 2016).

Informasi mengenai karakteristik petani usaha padi yang menjadi penerima PKH sangat diperlukan terutama bagi pengambil kebijakan agar mendapat gambaran awal sebagai langkah untuk menganalisis lebih lanjut perihal kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan yang menjadi isu sentral saat ini. Karakteristik tersebut diantaranya dapat berupa penguasaan lahan, karakteristik rumah tangga, struktur pendapatan, struktur input usahatani, dan pola konsumsi rumah tangga.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik petani usaha padi penerima PKH di Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan kabupaten ini karena merupakan wilayah sentra produksi padi dan banyak rumahtangga penerima program perlindungan sosial (PKH dan Raskin). Selain itu, lokasi Kabupaten Karawang dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan wilayah perkotaan (Karawang, Jabodetabek dan Bandung), sehingga dapat memberikan gambaran berbagai kesempatan kerja dan diversifikasi pendapatan rumahtangga petani.

Unit penelitian dari survei ini adalah rumahtangga usahatani padi penerima PKH. Penentuan unit penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang mengarah kepada gambaran tentang program perlindungan sosial. Jumlah responden yang dipakai dalam pengolahan sebanyak 139 rumahtangga petani.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden dengan pengisian kuesioner. Data yang dikumpulkan meliputi: (1) karakteristik anggota rumahtangga petani, (2) karakteristik perilaku ekonomi rumahtangga petani, terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi, dan (3) informasi PKH dan raskin yang diterima petani.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November-Desember 2017 dimana karakteristik rumahtangga dan kinerja usaha pertanian yang diteliti adalah kondisi pada rentang waktu November 2016 sampai dengan Oktober tahun 2017.

Metode Pengambilan Sampel dilakukan secara *multistage*. Penentuan lokasi sampel kecamatan secara *purposive* yaitu kecamatan Kutawaluya, Tempuran, dan Martapura. Selanjutnya penentuan lokasi sampel desa juga secara *purposive* sebesar 60 persen dari jumlah desa pada masing-masing kecamatan terpilih (4 sampai 6 desa). Data jumlah peserta PKH masing-masing desa terpilih telah diperoleh dari Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Data tersebut digunakan sebagai kontrol jumlah peserta PKH. Sedangkan database peserta PKH juga diperoleh dari Koordinator PKH Kabupaten Karawang.

Selanjutnya dari daftar nama petani padi pada desa terpilih di kecamatan terpilih dari database peserta PKH yang *eligible* disusun sebagai kerangka sampling (*sampling frame*) rumahtangga petani, yakni rumahtangga petani penerima menggarap/memiliki usahatani padi. Berdasarkan kerangka sampling ini diperoleh total rumahtangga usahatani padi penerima PKH (Nt). Jumlah rumahtangga sampel ditentukan sebanyak 30 persen dari total rumahtangga usahatani padi penerima PKH. Penentuan ukuran sampel untuk masing-masing desa dilakukan secara proporsional. Unit penelitian diperoleh secara random dengan teknik *simple random sampling (SRS)*.

Analisis data yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis juga memperbandingkan dengan data petani secara umum yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Penguasaan Lahan Usahatani

Luas lahan yang dikuasai petani terutama pada lahan irigasi sangat menentukan tingkat pendapatan yang mereka terima (Booth 2012). Sedangkan menurut Susilowati dan Maulana (2011), salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan adalah peningkatan akses penguasaan lahan oleh petani. Hal ini karena lahan yang luas akan menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi sehingga penghasilan petani semakin tinggi. Hasil penelitian di Kabupaten Karawang rata-rata lahan pertanian yang

dikuasai rumahtangga petani adalah sebesar 0,64 Ha. Sementara, secara umum berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, rata-rata lahan pertanian yang dikuasai rumahtangga usaha pertanian adalah sebesar 0,86 Ha (BPS 2014). Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat penguasaan lahan antar petani padi penerima PKH dengan petani secara umumnya.

Tabel 1 Persentase Status Penggarapan Lahan dan Luas Lahan Kabupaten Karawang

Rumahtangga	Penguasaan Lahan		Jumlah
	> 0,5 Ha	<= 0,5 Ha	
Menggarap Milik Sendiri	1.44	3.60	5.04
Menggarap bebas Sewa	0.72	2.16	2.88
Menggarap Bagi Hasil	41.73	50.36	92.09
Jumlah	43.88	56.12	100.00

Sumber: data primer, 2017

Tabel 1 menyajikan persentase penguasaan lahan oleh petani dirinci menurut status penguasaan lahan klasifikasi luas lahan. Pada tabel terlihat bahwa penguasaan petani terhadap lahan didominasi oleh petani yang menguasai lahan kurang dari setengah hektar (56,12 persen) selebihnya adalah penguasaan lahan lebih dari setengah hektar namun tidak melebihi dari 2 hektar. Menurut Booth (2012), rumahtangga yang memiliki lahan lebih kecil mengkompensasikan kecilnya pendapatan pertanian dengan bekerja di luar lahannya. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa hanya 5 persen petani yang menggarap lahan miliknya sendiri, selebihnya hampir 95 persen petani tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap.

Karakteristik Anggota Rumahtangga

Variabel karakteristik rumatangga petani tentang usia, lama sekolah, status pernikahan, dan curahan waktu kerja menurut anggota rumahtangga disajikan pada Tabel 3.

Usia berkaitan dengan pengalaman dan kematangan petani dalam melakukan usahatani. Usia juga akan mempengaruhi kemampuan fisik dan respon terhadap hal-hal baru dalam melakukan usahatani. Adanya kecenderungan bahwa petani muda lebih cepat mengadopsi suatu inovasi karena petani muda mempunyai semangat untuk mengetahui dan mencari tahu apa yang belum diketahuinya. Semakin tua usia petani juga semakin menurunkan kemampuan fisik petani dalam melakukan usahatani. Rata-rata usia petani (kepala rumahtangga) adalah 46 tahun, sedangkan istri 41 tahun. Hal ini berarti rata-rata usia petani penerima PKH cukup tua, akan tetapi beban para petani masih cukup berat. Pada setiap rumahtangga setidaknya terdapat satu anggota yang masih sekolah. Keberadaan anak sekolah mengindikasikan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan relatif tinggi. Tetapi di sisi lain, dengan adanya anak sekolah beban ekonomi petani menjadi makin besar karena harus menanggung biaya sekolah anak. Sementara itu, rata-rata usia anak laki-laki dan anak perempuan yang membantu kepala rumahtangga dalam mencari pendapatan masing-masing 23 dan 22 tahun. Keduanya termasuk dalam usia produktif.

Rata-rata tingkat pendidikan petani padi relatif masih rendah tersebut tentu berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam mengelola dan menguasai keterampilan serta penerapan teknologi budidaya tanaman padi. Agar petani memiliki keterampilan dan penguasaan yang baik terhadap berbagai teknologi dan penyuluhan, maka perlu ditunjang oleh berbagai

pelatihan yang tentunya memerlukan kemampuan dan tingkat pendidikan yang memadai. Jika penguasaan dan penerapan teknologi budidaya tanaman padi masih terbatas, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi padi yang dihasilkan.

Tabel 2 Karakteristik Anggota rumahtangga Petani, Kabupaten Karawang 2017

Karakteristik / Rata-rata	Suami	Istri	Anak Laki-laki	Anak Perempuan
1. Usia (Tahun)	46.46	41.12	23.76	22.63
2. Lama Sekolah (Tahun)	4.83	4.97	8.08	9.81
3. Persentase Menikah (%)	95.68	95.68	9.35	9.35
4. Rata-rata Curahan Waktu Kerja Pada Sektor (Hari Orang Kerja):				
a. Padi	62.15	39.10	15.41	13.30
b. Non Padi	0.83	0.00	1.51	0.00
c. Non Pertanian	43.74	29.45	36.06	11.64
Jumlah	106.72	68.54	52.99	24.94

Sumber: Data Primer, 2017

Tabel 3 juga menyajikan data tentang rata-rata lama sekolah yang menunjukkan tingkat pendidikan petani yang merupakan indikator sumberdaya manusia. Lama sekolah untuk suami dan istri masing-masing adalah 4,83 dan 4,97 tahun artinya secara rata-rata keduanya adalah bersekolah tetapi tidak tamat SD. Sementara rata-rata lama sekolah untuk anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing 8.08 dan 9.81 tahun. Artinya untuk anak laki-laki rata-rata tingkat pendidikan adalah Tidak Tamat SLTP, sedangkan untuk anak perempuan rata-rata tingkat pendidikan adalah Tamat SLTP.

Pada rumahtangga pertanian, waktu kerja merupakan sumberdaya utama yang dimiliki. Dalam rumahtangga, alokasi sumberdaya tenaga kerja diprioritaskan untuk usahatani yang dikelola. Namun demikian, umum dijumpai di pedesaan rumahtangga petani juga melakukan kegiatan produktif lain atau mengalokasikan sebagian waktu untuk kegiatan lain di luar usahatani utama. Alokasi waktu tenaga kerja rumahtangga petani sampel masih terfokus pada kegiatan pertanian. Secara implisit hal itu menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi sumber penghidupan rumahtangga di daerah penelitian. Disamping usahatani padi, sebagian rumahtangga juga memiliki usahatani lain non padi. Bahkan sebagian mereka juga masih melakukan pekerjaan lain seperti sebagai penjual jasa tenaga kerja (sebagai buruh tani).

Struktur Pendapatan Rumahtangga Usaha Padi Penerima PKH

Program perlindungan sosial dapat mengurangi hambatan ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, gizi dan kesehatan, dan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan keanekaragaman makanan. Di daerah pedesaan, perlindungan sosial dapat meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan memungkinkan rumah tangga pedesaan miskin untuk berinvestasi dalam kegiatan mata pencaharian yang lebih berisiko tetapi lebih besar menghasilkan, terutama dengan mengurangi kendala likuiditas dan mendukung mobilitas tenaga kerja (Slater dan McCord, 2009).

Salah satu tujuan PKH adalah Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumahtangga miskin dan rentan. Tabel 4 menjelaskan rata-rata pendapatan petani usaha padi penerima PKH yakni sebesar 30,5 juta per tahun (2,54 juta rupiah perbulan). Nilai ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan petani umumnya yang sebesar 53,3 juta rupiah pertahun (4,44 juta rupiah sebulan). Sedangkan jika melihat struktur pendapatan rumahtangga sebagaimana Tabel 4 terlihat adanya kecenderungan diversifikasi sumber pendapatan.

Tabel 3. Struktur Pendapatan Rumahtangga Usaha Padi Penerima PKH

No	Uraian	Hasil Survei 2017 ¹		Hasil ST 2013 ²	
		Nilai (Rp 000)	(%)	Nilai ³ (Rp 000)	(%)
	Jumlah Pendapatan	30.523	100,00	53.309	100,00
	Usaha	14.691	48,13	36.364	68,21
1	Tanaman Padi	10.297	33,74	27.218	51,06
2	Pertanian Non Padi	109	0,36		
3	Usaha Sektor Non Pertanian	4.285	14,04	9.146	17,16
	Upah	9.844	32,25	7.850	14,73
4	Upah di Sektor Pertanian Padi	6.402	20,97	5.702	10,70
5	Upah di Sektor Pertanian Non Padi	34	0,11		
6	Upah di Sektor Non Pertanian	3.408	11,16	2.149	4,03
	Pendapatan Lainnya	5.988	19,62	9.094	17,06
7	Penerimaan Transfer	784	2,57		
8	Penerimaan dari PKH, Raskin, dan KIP	2.308	7,56		
9	Perkiraan Sewa, Bagi Hasil, & Lainnya	2.896	9,49		

Sumber: ¹Data Primer, 2017 ²Sensus Pertanian, 2013;

Keterangan: ³ Nilai rata-rata yang telah disesuaikan kondisi inflasi 2013-2017

Menurut Ellis (1998) diversifikasi pendapatan merupakan ciri sekaligus strategi dari keberlangsungan hidup bagi individu maupun rumahtangga petani di pedesaan pada negara-negara berkembang. Adanya kecenderungan diversifikasi pendapatan di Kabupaten Karawang disebabkan karena: (1) selain berasal dari usahatani padi, sebagian besar petani dan anggota rumahtangganya bekerja sebagai buruh tani pada lahan sawah orang lain yang merupakan bentuk kearifan lokal (*nyeblok*), (2) lokasi kabupaten ini terhadap pusat perekonomian (Jabodetabek dan Bandung) lebih mudah diakses disamping ketersediaan kesempatan kerja di sektor non pertanian di lokasi penelitian, dan (3) adanya sumber dari program perlindungan sosial berupa PKH beserta tambahannya berupa KIP (kartu Indonesia pintar), dan raskin.

Sementara itu, sumber pendapatan yang diperoleh dari perlindungan sosial bagi rumahtangga sasaran komposisinya sebesar 9,9 persen. Hal ini relatif terbilang kecil dibanding dengan pendapatan rumahtangga sasaran di Meksiko (PICAMPRO) sebesar 20 persen (Todd *et al.* 2010).

Struktur Input Usaha Padi Penerima PKH

Total nilai produksi per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebagaimana Tabel 5 adalah sebesar 26,79 juta rupiah. Sedangkan total biaya per musim

tanam sebesar 18,69 juta rupiah. Komponen biaya produksi usaha yang terbesar adalah untuk sewa lahan (43,71 persen). Hal ini disebabkan karena sebagian besar (95 persen) adalah petani dengan sistem bagi hasil. Hal ini berbeda dengan hasil survei struktur ongkos usahatani (SOUT) yang dilakukan oleh BPS (2017), bahwa nilai sewa lahan bagi petani secara umum pada skala nasional sebesar 3,38 juta rupiah atau memiliki porsi sebesar 25,53 persen.

Tabel 4. Struktur Input Usaha Padi Penerima PKH, Kabupaten Karawang

No	Uraian	Hasil Survei 2017		SOUT 2017	
		Nilai (Rp 000)	(%)	Nilai (Rp 000)	(%)
A.	Nilai Produksi	26,796		18,371	
B.	Jumlah Biaya Usaha Padi	18,699	100.00	13,219	100.00
1	Total Upah	5,785	30.94	4,120	31.16
2	Jasa Pertanian	1,951	10.43	2,332	17.64
3	Benih/Bibit:	345	1.85	492	3.72
4	Pupuk :	1,380	7.38	1,207	9.13
5	Pestisida :	576	3.08	584	4.42
6	Sewa Lahan	8,173	43.71	3,375	25.53
7	Lain-lain	490	2.62	1,110	8.40

Sumber: Data Primer, 2017

Selanjutnya, komponen biaya produksi yang juga relatif besar adalah upah pekerja (30,94 persen) dan jasa pertanian (10,73 persen). Hal ini memberi konfirmasi bahwa budidaya tanaman padi sawah masih bersifat padat karya. Sedangkan kontribusi pupuk, dalam biaya usahatani pada segmen petani ini sebesar 7,38 persen atau senilai 1,38 juta rupiah.

Selain persoalan penghematan anggaran negara, intensitas penggunaan pupuk pada usahatani padi saat ini cenderung telah melebihi dosis rekomendasi, sehingga yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada petani untuk menerapkan penggunaan pupuk berimbang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Namun demikian, penyesuaian HET tersebut hendaknya tidak dilakukan secara drastis, untuk menghindari dampak psikologis yang negatif bagi petani. Untuk mempertahankan tingkat pendapatan petani padi, kenaikan HET tersebut perlu dibarengi kebijakan lain yang dilakukan secara bersamaan baik itu berupa kebijakan pertanian lain berupa kenaikan HPP gabah, maupun kebijakan lain berupa program perlindungan sosial (Susilowati 2016).

Pola Konsumsi Petani Penerima PKH

Pengambilan keputusan konsumsi oleh rumahtangga petani padi penerima PKH berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan rumahtangga petani baik untuk konsumsi pangan, non pangan, tabungan dan investasi produksi. Pengambilan keputusan konsumsi mempunyai hubungan dengan pengambilan keputusan produksi. Pengambilan keputusan produksi yang dilakukan rumahtangga petani akan mempengaruhi keputusan konsumsi melalui pendapatan yang diperoleh rumahtangga petani.

Pendapatan yang diperoleh rumahtangga petani dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diantaranya untuk pengeluaran konsumsi pangan karena langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh untuk mempertahankan kesehatan. Selain kebutuhan konsumsi pangan (makanan), rumahtangga petani juga mengeluarkan pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan non makanan, tabungan dan investasi.

Rata-rata pengeluaran rumahtangga petani usaha padi penerima PKH per kapita perbulan di Kabupaten Karawang sebagaimana Tabel 6 sebesar 523 ribu rupiah. Secara rata-rata nilai ini sedikit berada di atas garis kemiskinan Kabupaten Karawang sebesar 408.579 rupiah perkapita perbulan (BPS 2017).

Tabel 5. Pola Konsumsi Petani penerima PKH

No	Uraian	Survei ¹ (Rp 000)	(%)	Susenas ² (Rp 000)	(%)
A.	Makanan	278,128	53.16	484,114	60.02
1	Beras	81,260	15.53	69,264	8.59
2	Umbi-umbian	2,151	0.41	3,865	0.48
3	Ikan/udang/cumi/kerang	12,486	2.39	26,303	3.26
4	Daging, telur, dan susu	26,906	5.14	42,026	5.21
5	Sayur-sayuran dan kacang-kacangan	27,433	5.24	42,820	5.31
6	Buah-buahan	4,023	0.77	17,578	2.18
7	Bumbu-bumbuan, minyak dan kelapa	23,468	4.49	20,401	2.53
8	Bahan minuman	20,732	3.96	15,623	1.94
9	Makanan dan Minuman Jadi	14,084	2.69	152,316	18.88
10	Rokok	59,377	11.35	81,990	10.16
11	Makanan Lainnya	6,208	1.19	11,928	1.48
B.	Non Makanan	245,052	46.84	322,523	39.98
1	Perumahan dan Fasilitas RT	131,919	25.21	163,109	20.22
2	Aneka Barang dan Jasa	74,342	14.21	72,799	9.03
3	Pakaian Alas Kaki dan Tutup Kepala	15,469	2.96	26,260	3.26
4	Barang Bukan Makanan Lainnya	23,321	4.46	60,355	7.48
JUMLAH		523,180	100.00	806,637	100.00

Sumber : ¹Data Primer, Diolah ²BPS, Hasil Susenas Maret 2017

Pengeluaran rumahtangga terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Rumahtangga usahatani di Kabupaten Karawang mengeluarkan 278 ribu perkapita perbulan setiap bulan untuk berbagai komoditi makanan, setara dengan 53,16 persen dari total pengeluaran sebulan. Nilai persentase ini dapat disebut sebagai pangsa pengeluaran pangan. Pangsa pengeluaran pangan dapat dijadikan indikator yang memberikan gambaran mengenai kesejahteraan. Komoditas makanan memiliki elastisitas yang rendah sehingga peningkatan pendapatan tidak mengakibatkan peningkatan pengeluaran makanan secara progresif. Hal ini menjelaskan hukum Engel yang menyebutkan bahwa dengan asumsi tidak ada perbedaan harga yang dibayar untuk makanan, pangsa pengeluaran pangan rumahtangga akan semakin rendah seiring dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, rumahtangga juga mengeluarkan 245 ribu rupiah (46,84 persen) untuk membelanjakan pendapatannya pada pengeluaran bukan makanan yang didalamnya juga termasuk investasi kesehatan dan pendidikan.

Jika lebih dirinci menurut kelompok komoditas, pengeluaran untuk makanan yang terbesar digunakan untuk kelompok komoditas padi-padian dalam hal ini komoditas beras. Setiap penduduk mengeluarkan 81 ribu (15,53 persen) untuk konsumsi beras. Besarnya proporsi pengeluaran untuk padi-padian (beras) ini dikarenakan bahwa beras sebagai sumber karbohidrat dan energi merupakan makanan pokok dan selalu dikonsumsi setiap hari oleh setiap rumahtangga. Alasan lain tingginya pengeluaran beras disebabkan di Kabupaten Karawang banyak rumahtangga yang pekerjaan pokoknya petani padi.

Selanjutnya pengeluaran kelompok komoditas terbesar kedua adalah rokok dan tembakau yakni sebesar 59 ribu (11,35 persen) setiap bulan per kapita. Hal ini sejalan dengan banyak penelitian seperti penelitian Purwantini dan Ariani (2008) yang menyatakan bahwa konsumsi terbesar selain beras bagi petani di pulau Jawa adalah rokok dan kecenderungan ini tentu memprihatinkan ditinjau dari segi kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani belum tentu semua rokok yang dibeli digunakan sendiri karena rokok juga sebagai media interaksi sosial dengan teman atau saudara

Sementara itu, pengeluaran terbesar pada kelompok bukan makanan adalah pada kelompok perumahan dan fasilitas rumahtangga lainnya. Nilai pembelian pada kelompok ini sebesar 132 ribu rupiah atau sekitar 25 persen dari total pengeluaran petani. Kelompok ini terdiri atas sewa rumah (atau perkiraan sewa rumah untuk kondisi memiliki rumah sendiri), pengeluaran untuk listrik, air, gas LPG, bensin, pulsa handphone, dan lain sebagainya. Kelompok pengeluaran terbesar kedua adalah aneka barang dan jasa 74 ribu rupiah per bulan perkapita (14,21 persen). Komoditas dalam kelompok ini adalah komoditas yang tergabung dalam kelompok kesehatan dan pendidikan. Selain itu adalah peralatan mandi cuci dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan lahan bagi petani penerima PKH didominasi oleh petani yang menguasai lahan kurang dari setengah hektar.
2. Rata-rata tingkat pendidikan petani padi relatif masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam mengelola dan menguasai keterampilan serta penerapan teknologi budidaya tanaman padi.
3. Nilai rata-rata pendapatan total rumahtangga petani penerima PKH jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan petani umumnya. Selain itu, sumber pendapatan yang cenderung diversifikasi merupakan ciri sekaligus strategi dari keberlangsungan hidup bagi individu maupun rumahtangga petani.
4. Komponen biaya produksi usaha padi yang terbesar adalah untuk bagi hasil petani kepada pemilik lahan.
5. Rata-rata pengeluaran rumahtangga petani usaha padi penerima PKH per kapita perbulan sedikit berada di atas garis kemiskinan Kabupaten Karawang. Selain itu, pola konsumsi masih lebih besar diperuntukkan untuk makanan.

Saran

1. Pemerintah hendaknya tetap mempertahankan kebijakan pertanian yang memihak kepada petani kecil termasuk petani penerima PKH (misalnya kebijakan subsidi pupuk) dalam rangka untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan mereka.
2. Analisis lanjutan yang membahas tentang keterkaitan kebijakan perlindungan sosial dan atau kebijakan pertanian pada petani penerima PKH sangat diperlukan. Hal ini untuk mempelajari dampak kedua kebijakan tersebut terhadap kinerja rumahtangga pertanian dan terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth. 2012. Kinerja Sektor Pertanian Indonesia: Dua Belas Pertanyaan dan Beberapa Jawaban Tentatif. *Jurnal Analisis Sosial* 17:1-32.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Hasil Laporan Sensus Pertanian 2013. *Publikasi BPS* 2014 -----, 2013. Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia. -----, 2017. Kabupaten Karawang Dalam Angka 2017. *Publikasi BPS Kabupaten Karawang* 2017 ----- 2017a. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. ----- 2017b. www.bps.go.id.
- Chofyan I, Rustan H U, Hariyanto A. 2015. Upaya mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi nasional. *Ethos Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*: 149-160
- Ellis F. 1998. Household strategies and rural livelihood diversification. *The journal of development studies* 35(1):1-38.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2015. The State of Food and Agriculture, Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty.
- [PEMKAB] Pemerintah Kabupaten Karawang. 2017. <http://karawangkab.go.id/headline/penyerahan-bantuan-non-tunai-program-rumah tangga-harapan-pkh-tahap-pertama-oleh-menteri-sosial>.
- Ravallion M, Datt G. 1996. How important to India's poor is the sectoral composition of economic growth? *The World Bank Economic Review* 10(1):1-25.
- Slater R, McCord A. 2009. Social Protection, Rural Development and Food Security: Issues paper on the role of social protection in rural development. *London, UK: Overseas Development Institute*.
- Susilowati SH. 2016. Urgensi dan Opsi Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk. *Analisis Kebijakan Pertanian* 14(2):163-185.
- Tiberti L, Tiberti M. 2015. Rural Policies, Price Change and Poverty in Tanzania: An Agricultural Household Model-Based Assessment. *Journal of African Economies* 24(2):193-229. doi:10.1093/jae/eju035)
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2016. <http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/strategi-percepatan-penanggulangan-kemiskinan>
- Todaro MP, Smith SC. 2006. Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan. *Erlangga. Jakarta: Indonesia*.
- Todd JE, Winters PC, Hertz T. 2010. Conditional Cash Transfers and Agricultural Production: Lessons from the Oportunidades Experience in Mexico. *Journal of Development Studies* 46(1):39-67. doi:10.1080/00220380903197945)